

Praktek Kolusi dan Nepotisme Dalam Birokrasi

Jisman

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Email : jismanatjo76@gmail.com

Kata Kunci :

1. Kolusi
2. Nepotisme
3. Birokrasi
4. Orde Lama
5. Orde Baru
6. Reformasi

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, dan juga untuk mengetahui praktik kolusi dan nepotisme yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada era Reformasi. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka, yang mana merupakan suatu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data serta informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Dengan menggunakan landasan tiga era (Orde lama, orde baru dan reformasi) sebagai landasan dalam melihat praktek kolusi dan nepotisme dalam birokrasi yang ada di Indonesia, peneliti ingin melihat hal-hal yang memiliki indikasi adanya praktek kolusi dan nepotisme tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia yang telah berusia 74 tahun belum cukup dewasa dalam menghadapi praktik Kolusi dan Nepotisme yang ada, dan hal tersebut diperparah pada masa Orde Baru yang kurang lebih 32 tahun berkuasa. Era reformasi yang dinilai mampu menekan hal tersebut malah ikut-ikutan terlena dengan praktik yang telah mendarah daging pada masa orde baru tersebut. Lebih lanjut lagi bahwa hukum di Indonesia hanya berfokus kepada pemberantasan korupsi, walaupun dalam undang-undang dituliskan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jika saja pemerintah memperhatikan Kolusi dan Nepotisme dan membuatkan regulasi yang kuat terkait permasalahan tersebut maka bisa dipastikan praktik korupsi di Indonesia akan berkurang, sebab korupsi bisa terlaksana selama bertahun-tahun dan pelakunya seakan kebal terhadap hukum karena adanya praktik kolusi dan nepotisme di dalamnya.

Keyword :

1. *Collusion*
2. *Nepotism*
3. *Bureaucracy*
4. *Old Order*
5. *New Order*
6. *Reformation*

Abstract : *This study aims to examine the problems of Collusion and Nepotism in Indonesia, and also to find out the practices of collusion and nepotism that occurred during the Old Order, New Order, and during the Reformation era. This research uses the Pustaka study method, which is a data collection method that is directed at searching for data and information through documents, both written documents and electronic documents. By using the basis of three eras (Old Order, New Order and Reformation) as a basis for looking at the practice of collusion and nepotism in the bureaucracy in Indonesia, the researcher wants to see things that have indications of the practice of collusion and nepotism. The results of the study show that Indonesia, which is 74 years old, is not yet mature enough to face the existing practices of Collusion and Nepotism, and this was exacerbated during the New Order era which was approximately 32 years in power. The reformation era, which was considered capable of suppressing this situation, even got carried away with the practices that were ingrained during the New Order era. Furthermore, the law in Indonesia only focuses on eradicating corruption, even though the law states KKN (Corruption, Collusion and Nepotism). If the government only pays attention to Collusion and Nepotism and makes strong regulations regarding these problems, it is certain that corrupt practices in Indonesia will decrease, because corruption can be carried out for years and the perpetrators seem to be immune to the law because of the practice of collusion and nepotism in it.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, dan juga untuk mengetahui praktik kolusi dan nepotisme yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada era Reformasi.

Birokrasi berasal dari kata *Bureaucracy* yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas. Konsep Birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu konsep organisasi birokrasi ideal, yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul : "*Bureaucracy*". Secara Etimologi, birokrasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu : Sistem Pemerintahan. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, para birokrat melaksanakan tugas mereka berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjadi birokrat, mereka harus memiliki keahlian dan juga tingkat pendidikan yang dibutuhkan di tiap struktur pemerintahan. Dalam setiap sistem birokrasi, selalu memiliki seseorang yang ditunjuk atau dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin dan memperhatikan seluruh masyarakatnya.

Jika kita melihat dari perspektif sejarah, bangsa Indonesia telah beberapa kali berganti era/masa, yang mana pada masa kepemimpinan presiden Soekarno disebut dengan Orde lama / masa awal kemerdekaan, pada masa kepemimpinan presiden Soeharto disebut dengan Orde baru, dan masa setelah presiden Soeharto disebut dengan era Reformasi. Pada era reformasi, Indonesia telah beberapa kali berganti kepemimpinan, yang mana dimulai pada masa presiden Habibie, dan pada saat ini Indonesia di pimpin oleh presiden Joko Widodo.

Di wilayah daerah juga memiliki pemimpin yang mana disebut sebagai gubernur (Provinsi), Walikota (Kota), dan Bupati (Kabupaten) yang mana tugas mereka untuk memajukan daerah serta mensejahterahkan masyarakat di daerah tempat mereka memimpin. Selain itu, kepala daerah juga dibantu oleh jajaran pemerintahan yang ditunjuk langsung untuk membantu kepala daerah dalam membantu tugasnya, yang diharapkan selalu menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, ada saja praktik yang dilakukan oleh para birokrat yang tidak sesuai dengan kewajiban mereka, seperti praktik kolusi dan nepotisme. Dalam praktiknya, banyak tindakan para birokrat yang mengarah pada praktik kolusi dan nepotisme yang mereka lakukan, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Contoh praktik kolusi seperti pengadaan barang kantor melalui broker (Perantara), dan praktik nepotisme seperti pembagian kekuasaan berdasarkan sistem kekerabatan dan berdasarkan garis darah.

LANDASAN TEORI

1. Kolusi

Menurut M Dawan Rahardjo (1999) Kolusi adalah perjanjian antar perusahaan untuk bekerja sama, guna menghindari persaingan yang saling merusak. Cara untuk mencapai kerja sama itu sejak perjanjian yang sifatnya informal hingga yang rahasia atau sembunyi-sembunyi, mulai dari penggabungan informasi hingga pengaturan resmi dalam suatu organisasi, dimana sanksi dikenakan bagi yang melanggar. Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusi merupakan : "Permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau

negara". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kolusi adalah sebagai persekongkolan rahasia untuk maksud atau tujuan yang tidak terpuji.

Paul A. Samuelson dalam bukunya *Economics* (M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*) mendefinisikan kolusi sebagai "perjanjiandi antara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam menaikkan harga, membagi pasar yang berakibat membatasi persaingan bebas". Menurut Merriam-Webster's Dictionary (1984), "*collusion is an agreement or illegal cooperation in which the purpose is to deceive or deceive the other party* (kolusi adalah suatu perjanjian atau kerja sama ilegal dimana tujuannya untuk menipu atau memperdaya pihak lain)". Menurut *Oxford Dictionary*, "*collusion is a conspiracy or secret collaboration that is illegal to deceive others* (kolusi adalah suatu persekongkolan atau kerja sama rahasia yang ilegal untuk menipu orang lain)".

Adapun contoh dari kolusi itu sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Misalnya pada saat diadakan musyawarah bersama untuk menyelesaikan masalah, ada salah satu pihak yang tidak sependapat dengan pihak lain. Dimana pihak yang tidak setuju itu adalah pihak yang mementingkan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Dan pihak yang tidak sependapat tersebut mempengaruhi pihak lain untuk berpihak bersama, maka terjadilah persekutuan yang merugikan orang banyak karena persekutuan tersebut. Itulah yang disebut dengan kolusi.
2. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari dari kolusi yaitu bersekongkol untuk mengerjai teman. Misalnya andi bersama temannya bernama budi yang terkenal dengan kenakalannya berniat untuk mengerjai soni. Yang dilakukan andi dan budi untuk mengerjai soni adalah dengan mengempesi ban motor soni, sehingga soni harus mendorong motornya tersebut ke tambal ban yang jaraknya lumayan jauh. Maka yang dilakukan andi dan budi adalah kegiatan kolusi, karena mereka bersekongkol untuk hal yang tidak baik yaitu untuk mengerjai si soni.

2. Nepotisme

Menurut Chambers Murray (1983) : *"The word nepotism comes from the Latin word nepos, which means "nephew" or "grandchild", in terms of giving priority to family members or friends in giving work or privileges* (Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti "keponakan" atau "cucu", secara istilah berarti mendahulukan anggota keluarga atau kawan dalam memberikan pekerjaan atau hak istimewa)". Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan bahwa : " Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nepotisme diartikan sebagai kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.

Adapun dampak dari praktik Nepotisme yaitu :

1. Nepotisme dapat menimbulkan konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang anggota keluarga ditempatkan sebagai pengawas langsung di atas anggota keluarga yang lain. Rekan sekerja tidak akan merasa nyaman dalam situasi seperti itu, oleh karenanya hal seperti ini harus dihindari (Pope, 2003).
2. Diskriminasi dalam memperoleh kesempatan pengembangan diri dan karier berdampak pada menurunnya motivasi dan semangat kerja, serta penurunan kinerja pegawai yang masuk melalui jalur rekrutmen resmi. Tingkat perilaku politik yang tinggi dalam organisasi dapat menjadi sumber stress bagi banyak karyawan. Politik kantor secara konsisten dinyatakan sebagai stressor utama dalam organisasi. Aktivitas politik dan pergulatan kekuasaan dapat menciptakan friksi, meningkatkan persaingan disfungsi antara individu dan kelompok, dan meningkatkan stress (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2005).

3. Nepotisme dapat menutup kesempatan orang lain yang memiliki hak untuk berkembang. Apalagi bila orang tersebut memiliki masalah pribadi dengan salah satu anggota keluarga pemimpin atau pemilik perusahaan.
4. Timbulnya pemikiran pragmatisme dalam masyarakat, dimana untuk mendapatkan pekerjaan atau posisi tertentu bukan lagi melalui persaingan dan prosedur, tetapi dengan cara nepotisme.
5. Potensi terjadi kerusakan sosial (keluarga, masyarakat, negara, dan agama) akan semakin besar karena pelaku nepotisme tidak lagi peduli pada kualitas dan kepentingan umum, namun hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi dan keluarga semata.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi Kepustakaan / *Library Research* (T & Purwoko, 2017). Studi kepustakaan sendiri ialah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data serta informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik (Sugiyono, 2005). Adapun informasi yang dikumpulkan untuk menunjang penulisan ini yaitu : Buku, Jurnal, Sumber elektronik serta Sumber lain yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang referensi

PEMBAHASAN

Praktik kolusi dan nepotisme di Indonesia telah ada pada masa awal kemerdekaan negara republik indonesia hingga saat ini, dan juga praktik kolusi dan nepotisme di indonesia tidak lepas dari yang namanya tindakan korupsi. Di Indonesia sendiri, kolusi dan nepotisme menjadi satu paket dengan yang namanya korupsi dan biasa kita kenal dengan penyebutan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Indonesia telah mengalami beberapa pergantian kepala negara dan juga diklasifikasikan menjadi tiga masa atau era. Pertama ialah masa kepemimpinan presiden Soekarno yang disebut sebagai masa orde lama, yang kedua ialah masa kepemimpinan presiden Soeharto yang disebut dengan masa orde baru, dan masa kepemimpinan setelah presiden Soeharto disebut dengan era reformasi. Di era reformasi

terdapat beberapa orang yang menjadi kepala negara, dimulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus dur), Megawati Soekarno Putri (Anak dari presiden pertama indonesia, Soekarno), Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan bapak SBY (memimpin selama 2 periode), dan Joko Widodo.

1. Orde Lama

Pada masa ini yaitu masa kepemimpinan presiden Soekarno, perilaku kolusi para pejabat pemerintah dan penyelewengan gelontoran kredit dari pemerintah oleh para kreditur (Nu Online, 2017). Selain itu praktek kolusi di era presiden Presiden Soekarno mengakibatkan tidak berjalannya tugas Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang merupakan lembaga pemberantasan KKN saat itu, dikarenakan para pejabat lebih memilih memberikan formulir yang disediakan (saat ini, formulir tersebut disebut dengan daftar kekayaan pejabat negara) kepada presiden secara langsung ketimbang menyerahkan kepada Paran. hal tersebut menggambarkan bahwa pejabat pada saat itu memiliki hubungan yang cukup kuat dengan presiden Soekarno.

Praktik kolusi yang lain dapat dilihat yaitu pada saat dibubarkannya operasi Budhi yang dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 275 Tahun 1963. Operasi Budhi Merupakan lembaga yang memiliki hak untuk menjerat perusahaan serta lembaga yang terindikasi melakukan praktik korupsi. Pembubaran operasi budhi tersebut dikarenakan karena akan menjerat Direktur Pertamina pada masa itu. Hal ini memperlihatkan adanya praktik kolusi yang mana berupaya untuk mengamankan Direktur Pertamina pada saat itu yang terindikasi melakukan korupsi. Adapun praktik nepotisme pada masa ini yaitu penunjukan kepala daerah secara langsung oleh presiden.

2. Orde Baru

Masa orde baru merupakan era dimana presiden Soeharto memimpin selama kurang lebih 32 tahun. Di masa ini praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme tak dapat dibendung, sehingga presiden Soeharto dijuluki presiden terkorup di dunia (berdasarkan laporan PBB dan Bank Dunia). Kekayaan negara yang dicuri oleh presiden Soeharto dan keluarganya diperkirakan mencapai 15 sampai 35 miliar dolar AS (wennyfarida.web.unej.ac.id).

Praktik kolusi dan nepotisme yang terjadi saat itu disebabkan lamanya presiden Soeharto berkuasa dan juga sistem pemerintahan yang terpusat (sentralistik) pada masa itu. Praktik kolusi juga terjadi dalam pembuatan kebijakan ekonomi, sebab dalam membuat kebijakan tersebut Soeharto mengandalkan saran dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya yaitu kroni kapitalis yang mana sebagian besar merupakan keluarga dan beberapa konglomerat etnis cina kaya (Indonesia Investment, 2017). Praktik kolusi yang paling terlihat ialah terjadi pada saat Tomy Soeharto (Anak dari presiden Soeharto) terbebas dari jeratan korupsi yang menyeret namanya. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa ia terbebas karena kekuasaan dari ayahnya yaitu presiden Soeharto.

Adapun praktik nepotisme yang dapat dilihat pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dapat dilihat yaitu penunjukan kepala daerah secara langsung oleh presiden Soeharto. Pada masa orde baru tidak ada yang namanya pemilihan kepala daerah berdasarkan hak suara masyarakat di daerah tersebut, yang menduduki posisi kepala daerah pada masa itu hanya orang yang diminta atau ditunjuk langsung (hal ini sama seperti pemilihan kepala daerah pada masa orde lama). Praktik nepotisme yang paling terasa pada masa kepemimpinan orde baru yaitu mayoritas kepala daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati) merupakan anggota ABRI (Matanasi, 2018). Hal tersebut semakin dipertegas dengan tulisan dari Taufiq Tanasaldy dalam artikel Politik Etnis di Kalimantan Barat (dalam buku Politik Lokal di Indonesia, 2007) : “Dominasi militer makin tampak pada saat pihak militer mengambil alih posisi-posisi strategis yang sebelumnya dipegang masyarakat sipil”.

3. Reformasi

Setelah kejatuhan presiden Soeharto pada tahun 1998, era baru tercipta yaitu reformasi. Pada masa ini indonesia telah dipimpin oleh beberapa presiden, namun masih banyak terlihat yang namanya praktik kolusi serta nepotisme di negara ini.

3.1. Masa Kepemimpinan Presiden B.J.Habibie

Masa kepemimpinan presiden Habibie yang hanya 18 bulan / 1,5 tahun merupakan masa yang paling sulit, sebab merupakan masa transisi dari orde baru ke reformasi yang mana praktik KKN tumbuh subur pada masa orde baru. Selain itu, presiden Habibie juga dianggap sebagai antek-antek orde baru karena ia merupakan wakil presiden Soeharto pada masa

tersebut. Adapun praktik kolusi yang terlihat pada masa presiden Habibie yaitu pada saat ia dipaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden dengan alasan pelepasan Timor-Timur (yang saat ini menjadi negara Timor Leste), sebenarnya kita dapat melihat bahwa pelepasan Timor-timur dari wilayah Republik Indonesia memiliki alasan yang kuat yang salah satunya ialah karena Timor-Timur bukan wilayah bekas jajahan Belanda dan Jepang melainkan bekas jajahan Portugis.

3. 2. Masa Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus dur)

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus dur) merupakan presiden Republik Indonesia ke 4 setelah Habibie. Pada masa ini juga dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan dikembalikannya ABRI ke barak. Kegemaran Gus dur melakukan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai presiden, melahirkan kecurigaan masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawar-menawar tingkat tinggi (<https://antikorupsi.org>).

3. 3. Masa Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri

Setelah Gus dur lengser dari jabatannya seagai presiden, Megawati yang merupakan wakil presiden pada masa itu menggantikan gus dur sebagai presiden dan menjadi presiden wanita pertama dalam sejarah kepemimpinan Repulik Indonesia. Pada masa ini banyak kalangan mengapresiasi sebab 26 dari 32 menteri yang menjabat di kabinet gotong royong presiden Megawati merupakan kalangan profesional yang menguasai bidangnya masing-masing, dan hanya 4 menteri yang dari partai politik pada saat itu (Pratama et al, 2018). Pada masa kepemimpinan megawati lahirlah komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Tetapi banyak juga yang menilai bahwa presiden Megawati bukan tampil sebagai presiden, melainkan tampil sebagai ketua partai yang mengakibatkan roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana diharapkan banyak orang dan cita-cita reformasi. Menurut Ali Sadikin, Ketua kelompok kerja (Pokja) Petisi 50 pada saat itu: "Tentunya hal ini membuat mereka hanya loyal kepada partai. Seharusnya menteri RI bukan menteri partai dan Presiden RI bukan presiden partai". Lebih lanjut, ali sadikin menjelaskan bahwa : "Kenyataan memperlihatkan semakin meluas dan mendalamnya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, KKN (korupsi,

kolusi dan nepotisme), serta semakin maraknya politik uang dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan” (<http://www.politikindonesia.com>).

3. 4. Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden SBY merupakan presiden pertama yang terpilih berdasarkan pemilihan umum (Pemilu) dan juga presiden yang pernah memimpin selama dua periode / 10 tahun. Praktik kolusi dan nepotisme pada masa pemerintahan presiden SBY selama dua periode antara lain kasus bank century dan juga kasus dinasti politik Ratu Atut yang terjadi pada periode kedua kepemimpinan presiden SBY.

Praktik kolusi dalam skandal Bank Century yaitu pada saat dilakukan penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandara M. Hamzah oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membongkar skandal Bank Century (<https://www.kompasiana.com>). Disini dapat dilihat bahwa ada praktik kolusi yang mana untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam skandal bank century tersebut. Dalam buku yang ditulis oleh George Junus Aditjonro yang berjudul Membongkar Gurita Cikeas : Di Balik Skandal Bank Century dijelaskan bahwa praktik kolusi juga dilakukan oleh anak dari presiden SBY yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono. Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), di kampung halaman ayahnya di Pacitan, Jawa Timur, April 2009. Menurut laporan dua orang saksi, tim kampanye EBY membagi-bagi amplop berisi uang Rp 10 ribu disertai foto EBY ke calon-calon pemilih di Desa Clembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, 3 April 2009.

Selain itu praktik kolusi yang nampak ialah bebasnya Syamsul Nursalim atau Liem Tjoen Ho berkeliaran, padahal ia terindikasi kasus Bantuan Likuiditasi Bank Indonesia (BLBI). Hal tersebut dianggap sebagai kasus kolusi dikarenakan Syamsul Nursalim memiliki kedekatan dan berlindung dengan penguasa (presiden) dari masa ke masa. Di masa kepemimpinan Presiden SBY pun ia berlindung di bawah kekuatan penguasa agar terbebas dari jerat hukum dan juga agar dapat melebarkan sayap perusahaannya. Pada lampiran audit Badan Pengawasan Keuangan (BPK) No.02/Auditama/II/AK/XII/1999, dicantumkan, BDNI mendapatkan porsi tertinggi, yaitu 25,63% atau Rp 37,04 trilyun. Dalam perkembangannya, kewajiban akhir Syamsul Nursalim adalah Rp 28,4 trilyun, yang kemudian dijadikan angka

patokan penyusunan *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA). Persoalannya, BDNI-Syamsul Nursalim justru masuk dalam kategori obligor yang paling rendah tingkat pembayarannya. Dari kewajiban membayar hutang Rp 28,4 trilyun, Syamsul Nursalim baru membayar 17,4%. Tapi anehnya, meski belum melunasi utangnya, Syamsul Nursalim tahu-tahu sudah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL).

Terkait praktik nepotisme yang dapat kita lihat pada masa kepemimpinan SBY yaitu dinasti politik yang dilakukan oleh Ratu Atut. Adapun dinasti politik tersebut dimulai dari saat Ratu Atut menjadi pelaksana tugas Gubernur menggantikan Djoko Munandar yang terindikasi dengan dugaan kasus korupsi dana perumahan DPRD banten tahun 2001-2004 (<https://nasional.kompas.com>). Saat pilkada Banten tahun 2006, Atut mencalonkan menjadi Gubernur dan terpilih menjadi Gubernur Banten periode 2007-2012. Adapun dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut selama berkuasa dapat dilihat di bawah ini :

1. Suami Ratu Atut, Hikmat Tomet merupakan Ketua DPD Partai Golkar Banten. Kini duduk sebagai anggota Komisi V DPR. Hikmat kembali mengikuti pencalegan untuk Pemilu 2014 dari dapil Banten 2 (Kabupaten Serang, Kota Serang dan kota Cilegon)
2. Anak pertama Ratu Atut, Andika Hazrumy berstatus anggota DPD yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPR di dapil Pandeglang-Lebak.
3. Adik Andika, yakni Andiara Aprilia Hikmat kini mencalonkan diri sebagai anggota DPD
4. Menantu Ratu Atut, istri Andika, yakni Ade Rosi Khaerunissa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Serang. Dia pun mendaftar sebagai caleg DPRD Banten dari Partai Golkar
5. Kakak kandung Ratu Atut, Tatu Chasanah merupakan Wakil Bupati Serang
6. Kakak tiri Ratu Atut, Haerul Jaman adalah Walikota Serang
7. Adik ipar Ratu Atut, Airin Rachmi Diany merupakan Walikota Tangerang Selatan
8. Ibu tiri Ratu Atut, Heryani menjabat sebagai Bupati Pandeglang.

3. 5. Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Masa kepemimpinan presiden Jokowi dimulai pada tahun 2014 dan merupakan presiden kedua yang terpilih berdasarkan hasil pemillihan umum (pemilu). Di masa ini pun terdapat

beberapa kasus yang mana jika dilihat ada indikasi kolusi dan nepotisme. Menurut Prof Saldi Isra dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, terkuaknya beberapa praktik suap di lingkungan peradilan beberapa waktu terakhir di antaranya disebabkan gagalnya tindak pidana korupsi menjangkau perilaku menyimpang di internal birokrasi peradilan. Begitu pula dengan legislatif, bisa jadi kian kuatnya cengkeraman elite menguasai dan mengendalikan lembaga perwakilan rakyat, disebabkan sebagian partai politik dibangun dengan kentalnya praktik kolusi dan nepotisme. Begitu pula jajaran eksekutif, kedua penyakit tersebut masih menjadi virus yang berbahaya (<http://m.inilah.com>).

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menyimpan tanda tanya besar di benak masyarakat. Sebab, kasus yang terjadi pada tanggal 11 April 2017 tersebut sampai saat ini belum ditemukan siapa aktor yang melakukan dan siapa otak dari tindak kejahatan yang dilakukan terhadap penyidik senior KPK tersebut. Markas Besar Kepolisian RI akhirnya membentuk tim gabungan untuk menindaklanjuti kasus Novel Baswedan awal 2019. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan tim gabungan itu merupakan tidak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM akhir Desember 2018 (<https://nasional.tempo.co>). Timbul kecurigaan masyarakat bahwa kasus tersebut sengaja tak diusut secara tuntas karena ingin melindungi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi.

Kasus selanjutnya yaitu pada saat Budi Gunawan menjabat sebagai Wakapolri. Budi Gunawan kemudian di-plot menjadi Kapolri menggantikan Badrodin Haiti saat konflik KPK vs Polri terjadi di tahun 2015. Banyak yang mengatakan, dipaksakannya Budi Gunawan menjadi Kapolri adalah untuk mengamankan PDIP dan Megawati dari agresi KPK atas kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada tahun 2017 ia menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang pernah menjadi ajudan presiden maka akan menduduki posisi strategis di kemudian hari.

Pelantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri juga menjadi polemik di internal Polri dan juga bagi sebagian masyarakat. Dalam internal polri, pemilihan Tito Karnavian sebagai Kapolri cukup mengejutkan. Pemilihannya sempat memantik perdebatan hangat karena Tito "terpaksa" melangkahi perwira tinggi lain atau lima angkatan akademi kepolisian (akpol) di atasnya (<https://www.cnnindonesia.com>). Di kalangan masyarakat sendiri pelantikan Tito Karnavian

sebagai Kapolri juga mendapat berbagai reaksi. Ada yang berpendapat bahwa prestasi, ada pula yang berpendapat karena kedekatannya dengan Jokowi sebab ia menjadi salah satu Tim pemenang Jokowi di Papua pada saat pilpres 2014. Selain itu, Kenaikan pangkat terakhir yang membuat Tito mengalami lompatan pangkat dan unggul diantara rekan satu angkatannya adalah, ketika Tito dilantik menjadi Kepala BNPT setelah merasakan sembilan bulan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, sejak Juni 2015 hingga Maret 2016. Sebagai Kepala BNPT, Tito mendapatkan tambahan satu bintang menjadi Komisaris Jenderal (<https://www.viva.co.id>).

Selanjutnya ialah penunjukan Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemanusiaan dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK). Banyak yang menilai ia ditunjuk sebagai menteri karena "Jatah" dari PDI-P sebagai partai pendukung Presiden Jokowi dalam pilpres 2014. Selain itu, yang menjadi pertanyaan publik ialah Puan Maharani tidak pernah tersentuh Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut menjadi pertanyaan mengingat rankingnya selalu berada di papan bawah tabel kinerja menteri dalam beberapa survei kepuasan publik. Timbul pemikiran di masyarakat bahwa Puan Maharani tidak tersentuh reshuffle karena yang berada di belakangnya merupakan mantan presiden ke 5 RI dan juga merupakan ibu kandungnya yaitu Megawati, dan juga pemikiran masyarakat bahwa presiden Jokowi tidak akan melakukan Reshuffle kepada Puan Maharani karena mengingat jasa Megawati yang membuat ia menjadi presiden saat ini.

PENUTUP

Indonesia yang telah berusia 74 tahun belum cukup dewasa dalam menghadapi praktik Kolusi dan Nepotisme yang ada, dan hal tersebut diperparah pada masa Orde Baru yang kurang lebih 32 tahun berkuasa. Sebab di era tersebut banyak praktik Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pejabat bahkan sampai keluarga dari Presiden Soeharto sendiri.

Era reformasi yang dinilai mampu menekan hal tersebut malah ikut-ikutan terlena dengan praktik yang telah mendarah daging pada masa orde baru tersebut. Tercatat dalam 5 kali penggantian presiden masih banyak praktik kolusi dan nepotisme yang terjadi. Mulai dari lingkungan pemerintahan terbawah sampai dengan lingkungan pusat. Di masa kepemimpinan SBY tentang kasus Bank Century dan dibukukan dalam buku yang berjudul Gurita Cikeas

sampai di masa kepemimpinan Jokowi tetap masih ada Kolusi dan Nepotisme yang terjadi. Hal ini sangat disayangkan mengingat semua presiden yang pernah memimpin Indonesia berjanji akan memberantas KKN di Negeri ini.

Lebih lanjut lagi bahwa hukum di Indonesia hanya berfokus kepada pemberantasan korupsi, walaupun dalam undang-undang dituliskan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jika saja pemerintah memperhatikan Kolusi dan Nepotisme dan membuatkan regulasi yang kuat terkait permasalahan tersebut maka bisa dipastikan praktik korupsi di Indonesia akan berkurang, sebab korupsi bisa terlaksana selama bertahun-tahun dan pelakunya seakan kebal terhadap hukum karena adanya praktik kolusi dan nepotisme di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers Murray. (1983). *Latin-English Dictionary*.
- George Junus Aditjonro. (2009). *Membongkar Gurita Cikeas : Di Balik Skandal Bank Century*. Galangpress. Yogyakarta.
- <http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>
- <http://wennyfarida.web.unej.ac.id/2015/06/02/praktek-kkn-sebelum-dan-sesudah-pemerintahan-soeharto/>
- [http://www.politikindonesia.com / index. php ? k = politik&i = 1384](http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=1384) - Kinerja % 20 Pemerintahan%20Mega%20Mengecewakan
- <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-dari-dulu-hingga-kini>
- <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/18/0729208/Dinasti.Politik.Ratu.Atut.Setelah.Delapan.Tahun.Berkuasa?page=all>
- <https://nasional.tempo.co/read/1164184/hampir-dua-tahun-mandek-begini-perjalanan-kasus-novel-baswedan/full&view=ok>
- <https://pinterpolitik.com/menelusuri-jejak-kedekatan-pdip-polri/>
- <https://seputarilmu.com/2019/05/nepotisme-pengertian.html>
- <https://tirto.id/tabu-kinerja-menteri-puan-maharani-bwpl>
- <https://www.coursehero.com/file/p1bjl31/Contoh-dari-kolusi-Misalnya-pada-saat-diadakan-musyawahah-bersama-untuk/>

- <https://www.jatikom.com / 2018 / 11 / contoh - dan - pengertian - kolusi-nepotisme.html#ixzz5rYi4XHQ4>
- <https://www.kompasiana.com/bhayu/54ff4483a33311bd4c50f995/membongkar-gurita-cikeas-di-balik-skandal-bank-century-sebuah-resensi-pribadi>
- <https://www.liputan6.com/news/read/2598977/kursi-terhormat-untuk-2-mantan-ajudan>
- <https://www.liputan6.com/news/read/710975/mengintip-dinasti-politik-ratu-atut>
- <https://www.romadecade.org/biografi-bj-habibie/#!>
- <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/785703-lompatan-besar-jenderal-tito-karnavian>
- Indonesia Investment. (2017). Korupsi Di Indonesia. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235?>
- Ivancevich, John M, Robert Konopaske dan Michael T Matteso, (2009). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Korupsi
- Klinken, Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van. (2007). *Politik Lokal Di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), cet. Ke-1.
- Matanasi, P. (2018). Cerita Orde Baru Mendudukkan Kepala Daerah. <https://tirto.id/cerita-orde-baru-mendudukkan-kepala-daerah-cDfj>
- Merriam-Webster. (1981). *Webster's New Collegiate Dictionary*. London: Merriam Webster, Inc
- NU Online. (2017). Mengenal Korupsi dari Masa ke Masa. <https://www.nu.or.id/nasional/mengenal-korupsi-dari-masa-ke-masa-74JD2>
- Oxford Advanced Learner's Dictionary*. (2005). Oxford University Press
- Pope, Jeremy. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Pratama, A. N., Tamtomo, A. B., & Wedhaswary, I. D. (2018). INFOGRAFIK Serial Presiden: Megawati Soekarnoputri.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/25/11180751/infografik-serial-presiden-megawati-soekarnoputri?page=all>

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.

T. A. M., & Purwoko. B. (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK Unesa.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 527.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

